



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AFRA NAHETHA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 497314

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.500.000.000**

1. Tanah Seluas 30 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 767 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/180 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **30.000.000**

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **131.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	93.775.311
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.754.775.311
III. HUTANG	Rp.	32.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.722.175.311

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.